



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



PEMUTAKHIRAN
RENCANA KERJA

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV

2025

MAKASSAR



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV

NOMOR : SK. 24/BPHL-XV/REN.03.05/TU/12/2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMUTAKHIRAN BALAI PENGELOLAAN LESTARI WILAYAH XV TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemutakhiran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025 telah ditetapkan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemutakhiran sebagaimana huruf a perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemutakhiran Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemutakhiran Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 dengan keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV.
- d. bahwa Rencana Kerja Pemutakhiran Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 ini merupakan dokumen pemutakhiran dari Rencana Kerja Tahun 2025 yang disusun sebelumnya dengan keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Nomor SK. 33/BPHL-XIII/TU/REN.0/12/2024 .
- Mengingat : 1. Undang-undang Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 71 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV tentang Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV TENTANG RENCANA KERJA PEMUTAKHIRAN BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV TAHUN 2025
- KESATU** : Rencana Kerja Pemutakhiran Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Pemutakhiran Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 disusun sebagai acuan bagi :
- a. Pelaksanaan Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV;
 - b. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Lingkup Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV;
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 31 Desember 2025



KEPALA BALAI

MUCHKSIN
NIP. 19740727 200003 1 003

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV

NOMOR : SK. 24/BPHL-XV/REN.03.05/TU/12/2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMUTAKHIRAN BALAI PENGELOLAAN LESTARI WILAYAH XV
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan Pemutakhiran Rencana Kerja Tahun 2025. Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, terdapat pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV merupakan dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi balai. Pemutakhiran Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 sebagai dokumen pembaharuan setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025-2029.



Makassar, 31 Desember 2025

Kepala Balai,

Muchksin, S.Hut., M.Si
NIP. 197407272000031003

DAFTAR ISI

- Kata Pengantar i
- Daftar Isi ii
- Daftar Tabel..... iii
- Daftar Gambariv
- I. PENDAHULUAN 1
 - A. LATAR BELAKANG 1
 - B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI..... 3
 - C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA 4
- II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 8
 - A. CAPAIAN KINERJA BPHL WILAYAH XIII TAHUN 2024..... 8
 - B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2024..... 20
- III. RENCANA KERJA TAHUN 2025..... 22
 - A. STRATEGI Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025 22
 - B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN TAHUN 2025 24
- IV. PENUTUP 41

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup BPHL Wilayah XV	6
2. Matriks Cascading Program Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PHL Tahun 2020-2024	8
3. Capaian Kinerja dan Anggaran berdasarkan Cascading Sasaran Program, IKP, Sasaran Program Ditjen PHL, IKK Ditjen PHL, Rincian Output BPHL Wilayah XIII Tahun 2024	9
4. Capaian Serapan Anggaran BPHL Wilayah XIII Tahun 2024	20
5. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2025	25
6. Matriks Pemetaan Peran (<i>Crosscutting</i>) dalam Pencapaian Kinerja BPHL Wilayah XV	27
7. Matriks Cascading Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output lingkup BPHL Wilayah XV Tahun 2025	31
8. Rencana Kerja Kegiatan BPHL Wilayah XV Tahun 2025	37

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar/Diagram</i>	<i>Halaman</i>
1. Matriks SWOT Pengelolaan Hutan Lestari	2
2. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV	5
3. Sebaran Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV	7
4. Prioritas Nasional 2025 - 2029	23
5. Lima Pilar Pengelolaan Hutan Lestari	24
6. Crosscutting pemangku kepentingan lingkup Ditjen PHL	26
7. Crosscutting pemangku kepentingan lingkup BPHL	27
8. Pohon Kinerja BPHL Wilayah XV Tahun 2025	36

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara tanggal 21 Oktober 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi dua lembaga yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Yang selanjutnya tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan tanggal 18 Desember 2024. Proses transisi ini bertepatan dengan berakhirnya periode pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024.

Dengan terbentuknya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan pada masa transisi dengan tema : "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". RKP Tahun 2025 sebagai tahap awal dalam pelaksanaan agenda pembangunan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sasaran pembangunan Tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan serta intensitas emisi gas rumah kaca.

Selain menjadi awal periode penguatan transformasi menuju Indonesia Emas Tahun 2045, Tahun 2025 menjadi tahun transisi bagi kementerian/lembaga salah satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara terdapat pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Tema pembangunan Kehutanan 2025 : "Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Hasil Hutan untuk Pemerataan Pembangunan Ekonomi Wilayah" dengan sasaran pembangunan kehutanan antara lain : (1) Pertumbuhan PDB dan Ekspor Kehutanan sebesar 3-5 %; (2) Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan sebesar 7-8 % dan (3) Penurunan laju penyusutan hutan sebesar 3-4 %.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menghasilkan analisis strategis dalam bentuk matriks *SWOT* sehingga dapat membantu pengambilan langkah-langkah strategis pengelolaan hutan lestari. Matriks *SWOT* pengelolaan hutan lestari dapat dilihat pada Gambar 1.

Matriks SWOT Pengelolaan Hutan Lestari



Sejalan dengan sasaran pembangunan kehutanan Tahun 2025, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menjalankan 2 (dua) program yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Arahannya program pengelolaan hutan berkelanjutan adalah sebagai berikut : (a) Penguasaan hutan yang berkeadilan (Penyelesaian sawit non prosedural dalam kawasan hutan, penerbitan/pencabutan izin pemanfaatan kawasan hutan, audit dan pemberlakuan sanksi); (b) Hutan sebagai sumber swasembada pangan (Penyediaan lahan untuk food estate, perhutanan sosial untuk mendukung makan bergizi gratis); (c) Menjaga hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia (rehabilitasi hutan dan lahan, menjaga *biodiversity*, antisipasi kebakaran hutan); (d) Indonesia satu peta dalam *One Map Policy*.

Program Dukungan Manajemen mendukung pencapaian sasaran program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan sistem pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja yang jelas, teratur dan efektif dengan arahan sebagai berikut : (a) Peningkatan reformasi birokrasi melalui perencanaan dan penganggaran program yang berorientasi pada dampak; (b) Digilitasi layanan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Digilitasi seluruh layanan Kementerian Kehutanan, digilitasi pembayaran non-tunai); (c) Pemenuhan pembayaran gaji; (d) Operasional perkantoran.

Pemutakhiran Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun merujuk pada Pemutakhiran Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025 sebagai titik awal penguatan transformasi dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV (BPHL Wilayah XV) adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari yang berkedudukan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. BPHL Wilayah XV memiliki wilayah kerja 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV menyelenggarakan program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

Balai Pengelolaan Hutan Lestari mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Balai Pengelolaan Hutan Lestari Hutan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
2. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
4. Pelaksanaan penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan
5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pelaksanaan tugas Kepala Balai dibantu oleh Seksi Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi maupun instansi lain di luar Balai sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas masing-masing struktur organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan,

kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.

2. Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Seksi PPPHPL) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan, usulan rencana pemanfaatan hutan; kerja sama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; serta penugasan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Seksi PEPHPL) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan; pengolahan dan pemasaran hasil hutan; serta pemantauan dan penilaian kinerja tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
4. Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Adapun struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV

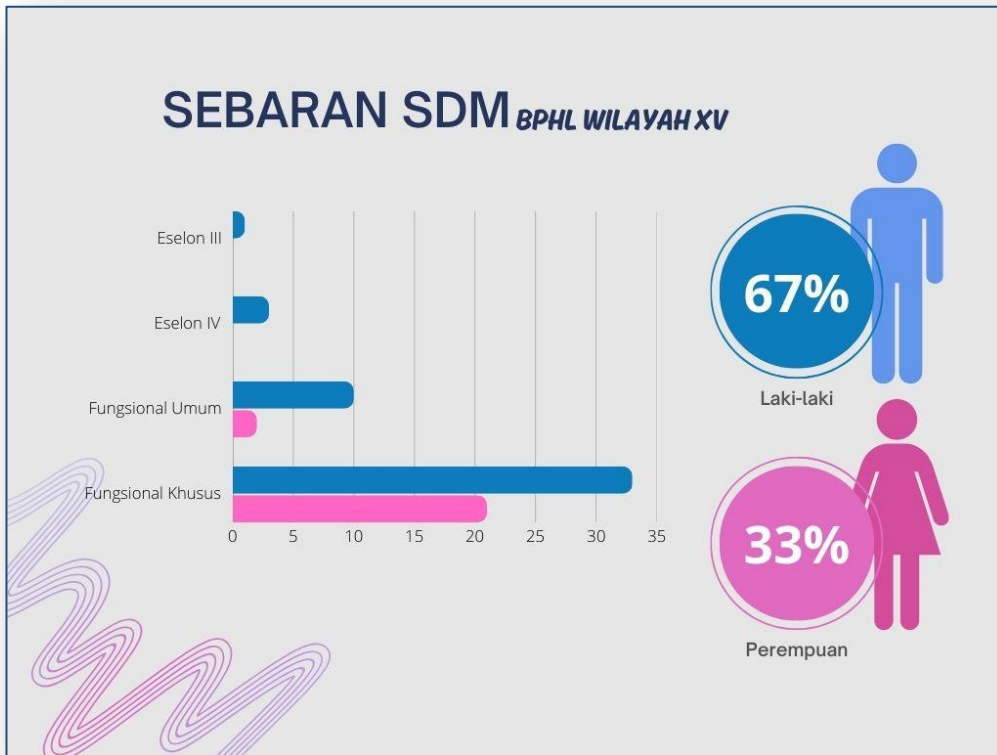
Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 70 (tujuh puluh) orang, yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) orang laki-laki dan 23 (dua puluh tiga) orang perempuan yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 18 (delapan belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seperti dalam Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup BPHL Wilayah XV

No.	Lokasi	Golongan IV		Golongan III		Golongan II		Golongan I		Jumlah		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV												
1	Eselon III-A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Khusus	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Jumlah		5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Sub Bagian Tata Usaha												
1	Eselon IV-A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Umum	0	0	3	2	5	0	0	0	8	2	10
3	Fgs. Khusus	1	0	6	2	1	1	0	0	8	3	11
Jumlah		2	0	9	4	6	1	0	0	17	5	22
Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												
1	Eselon IV-A	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fgs. Khusus	2	0	6	8	2	2	0	0	10	10	20
Jumlah		2	0	7	8	2	2	0	0	11	10	21
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												
1	Eselon IV-A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Fgs. Umum	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2	Fgs. Khusus	3	1	7	6	1	1	0	0	10	8	18
Jumlah		6	1	7	6	1	1	0	0	14	8	22
Total		15	1	23	11	1	4	0	0	46	23	70

5

Sumber : Sumber : SIMPEG Tahun 2025



Gambar 3. Sebaran Sumber Daya Manusia Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV

II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

A. CAPAIAN KINERJA BPHL WILAYAH XIII TAHUN 2024

Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari pada Tahun 2024 melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Balai Tahun 2020 - 2024. Keberhasilan kegiatan ini didasarkan atas pencapaian target Indikator Kinerja yang telah ditentukan selama kurun waktu 2020 - 2024, yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Cascading Program Sasaran dan Indikator Kinerja Ditjen PHL Tahun 2020-2024

No	Program	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. T1.S4.1.1 Meningkatnya Produktivitas Hutan pada kawasan hutan	1. T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan
		2. T2.S2.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	2. T2.S2.1.1.1 Jumlah Produksi Kayu Bulat
		3. T2.S3.1.1 Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	3. T2.S3.1.1.1 Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan
		4. T2.S4.1.1 Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan	4. T2.S4.1.1.1 Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan
		5. T3.S3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	5. T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat
2	Dukungan Manajemen	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Revisi RENSTRA DITJEN PHL 2020-2024

Tabel 3. Capaian Kinerja dan Anggaran berdasarkan Cascading Sasaran Program, IKP, Sasaran Program Ditjen PHL, IKK Ditjen PHL, Rincian Output BPHL Wilayah XIII Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Prognosa Capaian Output		Prognosa Capaian Anggaran (Rp.)	
									Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)
A Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan												
1	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	T1.S4.1.1 Meningkatnya Produktivitas Hutan pada kawasan hutan	T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan	T1.S4.1.1.1.1	T1.S4.1.1.1.1.1	Hektar					
					T1.S4.1.1.1.2	T1.S4.1.1.1.2.1		Juta Ha				
						T1.S4.1.1.1.2.2	KPH		Fasilitas Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	1 Lembaga	1 Lembaga	399.195.000
						T1.S4.1.1.1.2.3	KPH	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	1 Lembaga	1 Lembaga	222.061.000	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Prognosa Capaian Output		Prognosa Capaian Anggaran (Rp.)	
									Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)
2	T2.S2 Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.2.1 Kontribusi sector kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.1 Meningkatnya Produksi Kayu Bulat	T2.S2.1.1.1 Jumlah produksi kayu bulat	T2.S2.1.1.1.1 Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	T2.S2.1.1.1.1.1 Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Dit. PUPH)	Unit					
						T2.S2.1.1.1.1.2 Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Dit. PUPH)	Ton	Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	461.428.163.000	100
						T2.S2.1.1.1.1.3 Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan (Dit.PUPH)	Unit	Fasilitasi pengembangan multiusaha bagi perizinan berusaha pemanfaatan hutan	1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	213.499.000	99,90
						T2.S2.1.1.1.2 Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan	T2.S2.1.1.1.2.1 Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Unit	Kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	453.549.750

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Prognosa Capaian Output		Prognosa Capaian Anggaran (Rp.)	
									Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)
						T2.S2.1.1.1.2.2 Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan (Dit.BUPH)	Juta USD	Fasilitasi Implementasi RKUPH/ RKTPH	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	238.881.665	99,99
3	T2.S3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting	T2.S3.1. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	T2.S3.1.1. Meningkatkan Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1. Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	T2.S3.1.1.1.1. Meningkatkan produktivitas pengolahan hasil hutan	T2.S3.1.1.1.1.1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK (Dit. BPPHH)	Juta m ³	Fasilitasi dan pembinaan usaha pengolahan hasil hutan	11 Badan Usaha	11 Badan Usaha	227.819.197	99,93
						Perizinan berusaha pengolahan hasil hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya		11 Badan Usaha	11 Badan Usaha	516.176.620	99,96	
					T2.S3.1.1.1.2. Meningkatkan ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	T2.S3.1.1.1.2.1. Ekspor produk olahan hasil hutan (Dit. BPPHH)	Juta ton					
					T2.S3.1.1.1.2.2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK (Dit. BPPHH)	UMKM	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	3 UMKM	3 UMKM	672.789.650	100	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Prognosa Capaian Output		Prognosa Capaian Anggaran (Rp.)	
									Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)
4	T2.S4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNBPFungsional Kehutanan	T2.S4.1.1 Meningkatnya PNBPF dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1 Nilai PNBPF dari Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1 Meningkatnya PNBPF dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1.1 Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (Dit.IPHH)	Wajib Bayar	Pengawasan dan pengendalian PNBPF pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	174.652.940	99,99
						T2.S4.1.1.1.1.2 Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Dit.IPHH)	Unit	Layanan iuran dan Penatausahaan hasil hutan	3 Badan Usaha	3 Badan Usaha	145.787.933	99,99
5	T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oelh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	T3.S3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1 Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	T3.S3.1.2.1.1 Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Dit.PUPH)	Hektar	Fasilitasi dan pembinaan pemanfaatan hutan berbasis Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	109.845.720	99,99

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Sasaran Program UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Rincian Output (RO)	Prognosa Capaian Output		Prognosa Capaian Anggaran (Rp.)		
									Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (%)	
B	Program Dukungan Manajemen												
1	T4.S2. Meningkatnya birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien	T4.S2.1 Nilai kinerja reformasi birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	T4.S2.1.1.1.2 Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan public yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL)	Poin	Layanan Perkantoran	83 Poin	83 Poin	10.288.442.000	100	
						T4.S2.1.1.1.2.2 Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHPL (Sekditjen PHL)	Poin	Penilaian SPIP	3,5 Poin	3,7 Poin			
						T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Ditjen PHL yang tertib dan akuntabel (Sekditjen PHL)	Laporan	Layanan Umum	1 Laporan	1 Laporan	149.308.634	100	
							Unit	Layanan Sarana Internal	77 Unit	77 Unit	269.200.000	99,77	
						Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Poin	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	82,5 poin	82,5 poin	7.300.000	100	

Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka usaha pencapaian kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII dengan Rincian Output sebagai berikut :

Rincian Output : Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Target Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebesar 83 Poin dan untuk target pada Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah yaitu 83 poin. Tahun 2024 penilaian mandiri SAKIP pun di lakukan pada BPHL Wilayah XIII dengan nilai 87,86 poin. Dalam rangka implementasi SAKIP pada BPHL Wilayah XIII ditempuh beberapa langkah yaitu : (1) Meningkatkan pemahaman mengenai implementasi SAKIP lingkup BPHL Wilayah XIII; (2) Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan strategi pencapaian SAKIP lingkup Ditjen PHL; (3) Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh tim Auditor Inspektorat Wilayah III; (4) Melaksanakan Penilaian Mandiri Implementasi SAKIP pada e-SAKIP KLHK.

Rincian Output : Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

Perolehan nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2024 telah mencapai pada 4,445 poin dengan tingkat level 4, sedangkan untuk nilai maturitas BPHL Wilayah XIII mencapai perolehan nilai Maturitas SPIP sebesar 3,7 poin pada Level 3 (Terdefinisi). Sebagai upaya peningkatan kualitas SPIP, satuan kerja lingkup Ditjen PHL melaksanakan beberapa kegiatan yang diselenggarakan bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal KLHK, yaitu antara lain : (1) Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dan Pelaksanaan RPI Tahun 2024; (2) Pendampingan Reviu Rencana Pengendalian Intern Lapis Dua; (3) Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pengendalian Intern 2025 dan Manajemen Resiko Lingkup Ditjen PHL; dan (4) Bimbingan Teknis Pengendalian Resiko pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Ditjen PHL.

Rincian Output : Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel

Kegiatan penunjang pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan antara lain berupa kegiatan konsolidasi dan rekonsiliasi pemutakhiran data pada sistem keuangan SAKTI untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahunan 2023, Laporan Keuangan per Triwulan Tahun 2024, Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester I Tahun 2024, Penyusunan RKBMN Tahun 2025 dan Evaluasi Renstra dan Penyusunan Rencana Kerja, Koordinasi Pelaporan Capaian Output, Kegiatan Rekonsiliasi Data Piutang Negara di KPKNL, Reviu

Laporan Keuangan Tingkat UAKPA oleh Inspektorat Wilayah IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Bimbingan Teknis Pelaporan dan Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2024.

Rincian Output : Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan

Dalam rangka peningkatan perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan hutan, pada Tahun 2024, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJP/RPHJpd dan Bimbingan Teknis Tata Hutan KPH dan beberapa kegiatan pendukung lainnya. Pada BPHL Wilayah XIII terdapat 61 unit KPH, yang tersebar pada Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 24 unit KPH, Provinsi Sulawesi Barat 12 unit KPH dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 25 unit KPH. Terkait penyusunan dan pengesahan RPHJP, untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 24 unit KPH telah pengesahan RPHJP dan sudah sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 12 unit KPH telah memiliki RPHJP dan hanya 1 unit KPH yang sudah sesuai PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan untuk 11 unit KPH lainnya masih dalam proses penyusunan RPHJP sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021. Sedangkan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 18 unit KPH yang telah pengesahan RPHJP tetapi belum sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan 7 unit KPH masih dalam proses pengesahan RPHJP.

Rincian Output : Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari

Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari dilaksanakan dengan Kegiatan Bimbingan Teknis KPH yang dilaksanakan dengan melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan pembinaan KPH pada wilayah kerja BPHL Wilayah XIII. Kegiatan ini dilakukan pada beberapa unit KPH yaitu pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (KPH Sawitto dan KPH Bila), pada wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (KPH Gularaya, KPH Mekongga Selatan, KPH Mekongga Utara dan KPH Laiwoi Utara) dan pada wilayah Provinsi Sulawesi Barat (KPH Mamasa Tengah, KPH Karama, KPH Bonehau Kalumpang, KPH Karama). Kegiatan pendukung lainnya berupa kegiatan penilaian KPH Efektif dengan bekerjasama dengan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan dan Dinas Kehutanan Provinsi. Pemilihan objek KPH efektif berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, yang kemudian melakukan penilaian mandiri (*self*

assessment) untuk selanjutnya diverifikasi oleh tim gabungan dari Direktorat BRPH, BPHL Wilayah XIII dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Penilaian KPH Efektif Tahun 2024 dilaksanakan di KPH yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu KPH Ulu Bila dan KPH Cenrana pada Kabupaten Bone, KPH Saddang I Kabupaten Toraja dan KPH Jeneberang Kabupaten Gowa

Rincian Output : Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan

Kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang diawasi dan dikendalikan Tahun 2024 terdiri dari kegiatan : (1) Fasilitasi Pelayanan Permohonan PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi pada 2 (dua) unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yaitu PT. Rimba Alam Utama di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan pada PT. Lindungi Bumi Pertiwi; (2) Pembinaan Teknis Pengajuan PBPH yang bertujuan untuk mendorong percepatan penyesuaian PKSO menjadi PBPH atau PPPS untuk mewujudkan pemanfaatan hutan lestari dan peningkatan PNPB sektor kehutanan; dan (3) Kegiatan Forum Bisnis Usaha Pemanfaatan Hutan yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rincian Output : Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan

Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan dilaksanakan dengan (1) Kegiatan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan oleh PBPH di wilayah kerja PBPH PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan pada Gabungan Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT) Batu Bolong dan GAPOKTANHUT Bubun Bila di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kerjasama kemitraan dengan PBPH pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII, dan (2) Kegiatan Identifikasi/Pemetaan Konflik pada pada 3 (tiga) PBPH yaitu PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa, PT. Seleraya Agri Kabupaten Muna, PT. Inhutani Kabupaten Gowa dan 3 (tiga) Kelompok Tani Hutan yaitu KTH Lagara Kabupaten Soppeng, KTH Lemo Kabupaten Bone dan KTH Siparappe Kabupaten Pinrang.

Rincian Output : Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dilaksanakan pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melalui kegiatan pembinaan perlindungan hutan, fasilitasi dan pembinaan multiusaha kehutanan, identifikasi dan verifikasi multiusaha kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII antara lain pada Kabupaten Soppeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Mamuju Tengah.

Rincian Output : Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan

Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha melalui pelaksanaan Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII. Tahun 2024, kegiatan pengawasan dan pengendalian badan usaha pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman/Produksi Hasil Hutan/ Multiusaha Kehutanan dan Pengawasan dan Pengendalian Perlindungan Hutan pada Pemegang PBPH/Perizinan Lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat menyajikan data dan informasi serta memonitoring pelaksanaan kinerja PBPH/Perizinan lainnya yang ada di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII. Kegiatan ini dilaksanakan antara lain pada Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Muna pada Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rincian Output : Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH

Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH dilaksanakan pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melalui kegiatan : (1) Pengawasan dan pengendalian implementasi RKUPH/RKTPH yang dilaksanakan pada unit PBPH yaitu PT.Seleraya Agri di Kabupaten Muna, PT. Zedsko Permai Di Kabupaten Mamuju, PT. Inhutani Kabupaten Toraja dan PT. Adimitra Pinus Utama Kabupaten Gowa; (2) Bedah Kinerja PBPH dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait pemenuhan kewajiban PBPH yang telah

dilaksanakan, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban serta penyusunan rencana aksi tindak lanjut PBPH.

Rincian Output : Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dilaksanakan salah satunya dengan memberikan Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melalui kegiatan yaitu : (1) Bimbingan Teknis (SIGANISHUT, SI-PUHH dan SI-PNBP) di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara; (2) Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Pemenuhan Kewajiban PUHH dan PNBP untuk memberikan pendampingan terkait pemenuhan kewajiban pelaksanaan PUHH dan pembayaran iuran kehutanan dan/atau piutang Negara.

Rincian Output : Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil hutan

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan untuk memonitoring perkembangan pelaksanaan usaha pemanfaatan hasil hutan, penatausahaan dan kewajiban lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan agar usaha pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta kewajiban terkait iuran kehutanan terpenuhi. Tahun 2024, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan pada Wajib Bayar (WB) di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yaitu pada KPH Tina Orima Kabupaten Bombana, KTH Citra Alam Matajang Kabupaten Konawe dan PHAT Nasrullah Faisal Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rincian Output : Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan

Fasilitasi pembinaan usaha pengolahan hasil hutan melalui kegiatan Fasilitasi/Pendampingan Legalitas Pengolahan Hasil Hutan dan Pembinaan Teknis Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Harga Pasar pada PBPHH di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yaitu antara lain : UD. Sabbang Loan Kabupaten Luwu Utara, UD. Usaha Wajo Kabupaten Luwu Utara, UD. Zakiyah Mandiri Kabupaten Wajo, UD. Putra Masale Kabupaten Bone, UD. Nurul Utama Kabupaten Wajo, CV. Panrita Lopi Marine Kabupaten Bulukumba, LM Matahari Kabupaten Wajo, UD. Ki Kasha Kabupaten Sidrap, UD. Karya Farhan Kabupaten Maros, UD. Bersahaja Kabupaten Maros, UD. Sinar Arafah Kabupaten Jeneponto.

Rincian Output : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya

Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha dilaksanakan sebagai upaya untuk memonitoring proses pelaksanaan usaha yang baik, tertib dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, melalui pelaksanaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII melalui kegiatan : (1) Pemantauan Kinerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) di wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yaitu antara lain : UD. Neka Indah Kabupaten Luwu Timur, UD. Usaha Pebriadi Kabupaten Luwu Timur, UD. Miftahul Jannah Kabupaten Luwu Timur, UD. Usaha Abd. Munir Kabupaten Luwu Timur, UD. Agung Irawan Kabupaten Kolaka, UD. Sinar Permai Kabupaten Konawe, UD. Nur Ilahi Kabupaten Jeneponto, UD. Awal Harapan Baru Kabupaten Jeneponto, UD. Semoga Bahagia Kabupaten Luwu Timur, UD. Usaha Murni Kabupaten Luwu Timur dan CV. Nur Anisa Kabupaten Konawe Selatan; dan (2) Temu Usaha PBPHH yang dilaksanakan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rincian Output : UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL

Fasilitasi dan pembinaan UMKM Tahun 2024 dilaksanakan dalam beberapa kegiatan antara lain : (1) Inventarisasi dan verifikasi UMKM Kehutanan di wilayah kerja BPHL Wilayah XIII di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Barru, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng; (2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aktor SVLK di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; (3) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu bagi 3 (tiga) unit usaha PBPHH yaitu UD. Daffa Jaya di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, UD. Putra Masale di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan UD. Reyhan Pratama di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara; dan (4) Sosialisasi Peraturan SVLK di 5 (lima) kabupaten pada wilayah kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Luwu, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone dan Kabupaten Bantaeng.

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2024

Capaian serapan anggaran kegiatan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian serapan anggaran kegiatan pada Tahun 2024 sampai Bulan Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Capaian Serapan Anggaran BPHL Wilayah XIII Tahun 2024

KODE	Kegiatan/ Rincian Output	Anggaran (Rupiah)				Realisasi	(%)
		Pagu dengan Blokir	Blokir	Target tanpa Blokir			
029.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						
6729	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	855.334.000	234.078.000	621.256.000	621.948.065	99.99	
6729.BDB.001	Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan	414.612.000	15.417.000	399.195.000	399.152.779	99.99	
6729.QDB.002	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	440.722.000	218.661.000	222.061.000	222.055.786	100	
6730	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	483.186.000	29.580.000	453.606.000	453.549.750	99.99	
6730.BIH.001	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	483.186.000	29.580.000	453.606.000	453.549.750	99.99	
6731	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	1.024.578.000	395.000	1.024.183.000	1,023.458.949	99.93	
6731.BDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	109.915.000	0	109.915.000	109.845.720	99.94	
6731.BDH.002	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	213.499.000	0	213.499.000	213.303.401	99.91	
6731.QAC.002	Fasilitasi Implementasi RKUPH/RKTPH	239.211.000	77.000	239.134.000	238.881.665	99.89	
6731.QIH.001	Badan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	461.953.000	318.000	461.635.000	461.428.163	99.96	
6732	Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	384.077.000	63.600.000	320.477.000	320.440.873	99.99	
6732.BDH.002	Layanan luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	146.599.000	801.000	145.798.000	145.787.933	99.99	
6732.BIH.001	Pengawasan dan Pengendalian PNBP Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	237.478.000	62.799.000	174.679.000	174.652.940	99.99	

6733	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	1.562.333.000	145.148.000	1.417.185.000	1.416.785.467	99.97
6733.BDH.002	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	368.463.000	140.493.000	227.970.000	227.819.197	99.93
6733.QDG.002	UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu oleh BPHL	673.000.000	180.000	672.820.000	672.789.650	100
6733.QIH.001	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan Kinerjanya	520.870.000	4.475.000	516.395.000	516.176.620	99.96
029.03.WA. Program Dukungan Manajemen						
5396.EBA	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL	10.467.760.000	30.007.000	10.437.753.000	10.437.672.202	100
5396.EBA.962	Layanan Umum	162.246.000	12.935.000	149.311.000	149.308.634	100
5396.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.305.514.000	17.072.000	10.288.442.000	10.288.363.568	100
5396.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	269.817.000	0	269.817.000	269.200.000	99.77
5396.EBB.951	Layanan Sarana Internal	269.817.000	0	269.817.000	269.200.000	99.77
5396.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	100
5396.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7.300.000	0	7.300.000	7.300.000	100
Jumlah		15.054.385.000	502.808.000	14.551.577.000	14.549.615.806	99.99

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran kinerja juga tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor P.3/PHL/SET.5/REN.2/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 tentang Standar Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang menjelaskan bahwa capaian RO, nilai terbesar yang diperhitungkan adalah sebesar 120 % (seratus dua puluh persen).

III. RENCANA KERJA TAHUN 2025

A. STRATEGI Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025

Pembangunan Nasional tahun 2025-2029 mengangkat visi pembangunan nasional “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” dengan mengusung 8 (delapan) misi *Asta Cita* yang selanjutnya disebut Prioritas Nasional (PN) yaitu :

1) Prioritas Nasional 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2) Prioritas Nasional 2

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;

3) Prioritas Nasional 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4) Prioritas Nasional 4

Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan genderserta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;

5) Prioritas Nasional 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6) Prioritas Nasional 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7) Prioritas Nasional 7

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;

8) Prioritas Nasional 8

Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Gambar 4. Prioritas Nasional 2025-2029

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 2 yaitu "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru". Strategi Ditjen PHL dalam mendukung Prioritas Nasional (PN2) dilakukan melalui peningkatan kapasitas pengelola tapak, optimalisasi pemanfaatan ruang kelola hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi produksi hasil hutan yang didukung oleh peredaran hasil hutan yang tertib, hilirisasi industri hasil hutan melalui legalitas kayu serta penguatan UMKM kehutanan.

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan hutan lestari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dengan melakukan pendekatan dengan memastikan keberlanjutan fungsi ekologis, sosial dan ekonomi melalui pendekatan 5 (lima) pilar pengelolaan hutan

lestari. Pelaksanaan pengelolaan hutan lestari bertujuan untuk meningkatkan PNPB, ekspor, pasar domestik, penciptaan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan mitigasi-adaptasi perubahan iklim. Langkah korektif dalam menghadapi permasalahan pengelolaan hutan lestari adalah antara lain :

1. Konsolidasi spasial;
2. Membangun ekosistem bisnis yang sehat;
3. Penguatan peran KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak.



Gambar 5. Lima Pilar Pengelolaan Hutan Lestari

B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN TAHUN 2025

Perwujudan pengelolaan hutan lestari yang adaptif, inklusif, dan produktif untuk mengalirkan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi bagi pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045 dijumpai melalui 5 (lima) sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi;

2. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan Masyarakat sekitar hutan;
3. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional;
4. Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas;
5. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan.

Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2025

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program Ditjen PHL	Target Tahun 2025
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi	Peningkatan Luas Tutupan Hutan	428.000 juta hektar
		1. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan	Nilai transaksi ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan dengan masyarakat	10 Milliar Rupiah
		2. Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional	1. Nilai efisiensi pemanfaatan bahan baku menjadi kayu olahan	70 %
			2. Peningkatan rasio serapan getah pinus ke industri pengolahan dalam negeri	50 %
			3. Nilai investasi sektor kehutanan	0.24 Triliun Rupiah
			4. Nilai ekspor produk kehutanan dari pengelolaan hutan lestari	12,83 Miliar USD
			5. Produksi hasil hutan bukan kayu dari hutan lindung dan hutan produksi	450 ribu ton

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program Ditjen PHL	Target Tahun 2025
			6. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi	2,79 Triliun Rupiah
2	Dukungan Manajemen	1. Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	1. Nilai maturitas SPIP Ditjen PHL	3,8 poin
		2. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	1. Nilai SAKIP Ditjen PHL	76 poin

Sumber : Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2025.

Pencapaian kinerja Ditjen PHL dalam upaya pengelolaan hutan tidak lepas dari peran serta dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dimulai dari pemerintah pusat lintas Eselon I Kementerian Kehutanan, lintas kementerian/Lembaga, pihak swasta (unit manajemen), NGO Lembaga Donor, akademisi, sampai dengan masyarakat. Pada lingkup BPHL Wilayah XV juga terbentuk *crosscutting* berbagai pihak seperti Es. III lingkup Kemenhut, Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH), pihak swasta, unit usaha kehutanan dan masyarakat. Gambaran *crosscutting* dalam lingkup Ditjen PHL dapat dilihat pada Gambar 6 dan Tabel 6 berikut.



Gambar 6. Crosscutting pemangku kepentingan lingkup Ditjen PHL



Gambar 7. Crosscutting pemangku kepentingan lingkup BPHL

Tabel. 6 Matriks Pemetaan Peran (Crosscutting) dalam Pencapaian Kinerja BPHL Wilayah XV

Program	Sasaran Program (SP) UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Instansi yang Berhubungan (Crosscutting)	Peran
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi	Peningkatan Luas Tutupan Hutan	Optimalisasi Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1. Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif 2. Peta arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung	Dit. BRPH, KPH, PSKL, Dishut Prov. KTH, PBPH	Bersinergi aktif dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan hutan yang berkelanjutan
			Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mendukung fungsi ekologis	Luas Penanaman Pengkayaan Kawasan Hutan pada PBPH	Dit. PUPH, BPKH, Dishut Prov, KTH, PBPH	Bersinergi aktif dalam mempertahankan fungsi ekologis hutan dan menghasilkan sumberdaya yang berkelanjutan

Program	Sasaran Program (SP) UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Instansi yang Berhubungan (Crosscutting)	Peran
	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan	Nilai transaksi ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan dengan masyarakat	Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi	Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH	Dit.PUPH, PBPH, PSKL, BKSDAE, Dishut Prov, KTH	Berperan aktif dalam peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan
	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional	Nilai efisiensi pemanfaatan bahan baku menjadi kayu olahan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Serapan bahan Baku Industri terhadap rencana kebutuhan bahan baku 2. Tambahan produksi wood pellet dari efisiensi Hilirisasi dari Kayu log 3. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK 	Dit.BPPHH, DPR RI, Lembaga Sertifikasi, Dishut Prov, KPH, PBPHH	Berperan aktif dalam upaya peningkatan produksi olahan hasil hutan dan upaya peningkatan nilai ekspor produk olahan hasil hutan yang bersertifikat LK
		Peningkatan rasio serapan getah pinus ke industri pengolahan dalam negeri	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Jumlah Produksi gondorukem dan terptin dari hasil hilirisasi getah pinus	Dit.BPPHH, PSKL Dishut Prov, KPH, KTH, PBPH, PBPHH	Berperan dalam upaya peningkatan PNBPN dan penertiban PUHH
		Nilai investasi sektor kehutanan	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase luas Persetujuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terhadap luas areal arahan pemanfaatan 2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan 3. 	Dit. BUPH, PSKL, BPKH, Dishut Prov, KPH, PBPH	Berperan dalam upaya peningkatan usaha sektor kehutanan dan peningkatan PNBPN

Program	Sasaran Program (SP) UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Instansi yang Berhubungan (Crosscutting)	Peran
		Nilai ekspor produk kehutanan dari pengelolaan hutan lestari	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan	Dit. BPPHH, PBPHH, DPR-RI, Lembaga Sertifikasi, PSKL PBPH, PBPHH	Berperan dalam upaya peningkatan usaha sektor kehutanan dan peningkatan PNBP
			Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Produksi kayu bulat (Dit. PUPH)	Dit. PUPH, PSKL, BPKH, PBPH	Berperan aktif dalam upaya peningkatan PNBP
		Produksi hasil hutan bukan kayu dari hutan lindung dan hutan produksi	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	1. Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari MUK 2. Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari MUK	Dit. PUPH, PSKL, BPKH, PBPH, BPDASRH	Berperan aktif dalam upaya peningkatan PNBP
		Nilai penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan lindung dan produksi	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBP dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1. Persentase Perizinan Berusaha yang tertib melaksanakan WB dari pemanfaatan hutan	Dit. IPHH, PBPH, KPH, KTH, PSKL, BP2SDM, KPKNL, Akademisi,	Berperan dalam upaya peningkatan PNBP dan penertiban PUHH
				2. Indeks kepuasan perizinan berusaha dalam pelayanan pembayaran PNBP 3. Persentase Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan PUHH sesuai RKT 4. Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja		

Program	Sasaran Program (SP) UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Instansi yang Berhubungan (Crosscutting)	Peran
Dukungan Manajemen	Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Ditjen PHL	Meningkatnya nilai maturitas SPIP Ditjen PHL	Nilai Maturitas SPIP Ditjen PHL	PHL, SEKDITJEN, ITJEN	Bersinergi dalam meningkatkan kualitas kinerja, pelayanan, birokrasi, pelaporan yang lebih baik, efektif, efisien dan bertanggung jawab
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PHL	Meningkatnya nilai SAKIP Ditjen PHL	Nilai SAKIP Ditjen PHL	PHL, SEKDITJEN, ITJEN	

Dalam mendukung tercapainya sasaran program dan indikator kinerja program Ditjen PHL, Balai Pengelolaan Hutan Lestari akan melaksanakan ***“Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen”*** dengan kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
2. Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
3. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
4. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
5. Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Adapun Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output lingkup BPHL Wilayah XV disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Matriks Cascading Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Rincian Output lingkup BPHL Wilayah XV Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
A	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan								
1	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam memelihara fungsi ekologi	Peningkatan Luas Tutupan Hutan	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Optimalisasi Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase KPH yang memiliki penilaian kategori efektif (persen) (Dit. BRPH)	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	KPH yang masuk kategori efektif	2 Lembaga	687.499.00
					Peta arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (peta arahan) (Dit. BRPH)				
			Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mendukung fungsi ekologis	Luas Penanaman Pengkayaan Kawasan Hutan pada PBPH (ribu hektar) (Dit. PUPH)	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Penanaman hutan oleh PBPH/Hak pengelolaan	2 Badan Usaha	55.000.000
2	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan	Nilai Transaksi Ekonomi dari pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan dengan Masyarakat	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi	Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH (kelompok masyarakat) (Dit. PUPH)	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk kemitraan konsesi	1 Badan Usaha	258.740.000

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
3	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung & produksi yang berdampak terhadap perekonomian nasional	Nilai Efisiensi Pemanfaatan Bahan Baku menjadi Kayu Olahan	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Rasio Serapan bahan Baku Industri terhadap rencana kebutuhan bahan baku (persen) (Dit. BPPHH)				
					Tambahan produksi wood pellet dari efisiensi Hilirisasi dari Kayu log (ribu ton) (Dit. BPPHH)				
					Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK (juta m ³) (Dit. BPPHH)	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Pembinaan hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (PBPHH) skala kecil dan menengah	11 Badan Usaha	259.299.000
		Peningkatan Rasio Serapan Getah Pinus ke Industri Pengolahan Dalam Negeri	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Jumlah Produksi gondorukem dan terpentin dari hasil hilirisasi getah pinus (ribu ton) (Dit. BPPHH)				

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
		Nilai investasi sektor kehutanan	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan	Persentase luas Persetujuan perizinan berusaha pemanfaatan hutan terhadap luas areal arahan pemanfaatan (persen) (Dit. BUPH)	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	2 Badan Usaha	167.600.000
					Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (triliun rupiah) (Dit. BUPH)				
		Nilai Ekspor Produk Kehutanan dari pengelolaan hutan lestari	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global	Ekspor Produk Olahan Hasil Hutan (juta ton) (Dit.BPPHH)	BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	1 UMKM	390.602.000
			Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Produksi kayu bulat (juta m ³) (Dit.PUPH)	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Kayu	2 Badan Usaha	299.160.000

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
		Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari hutan lindung dan hutan produksi	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional	Luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dari MUK (ribu hektar) (Dit. PUPH)	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha	62.600.000
					Luas kawasan hutan untuk cadangan energi dari MUK (ribu hektar) (Dit. PUPH)	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Badan Usaha	309.300.000
		Nilai penerimaan negara bukan pajak pemanfaatan hutan lindung dan produksi	Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBPN dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Persentase Perizinan Berusaha yang tertib melaksanakan Wajib bayar (WB) dari pemanfaatan hutan (persen) (Dit. IPHH)				
					Indeks kepuasan perizinan berusaha dalam pelayanan pembayaran PNBPN (poin) (Dit. IPHH)				
					Persentase Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan PUHH sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) (persen) (Dit. IPHH)				

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output(RO)	Target	Anggaran (Rupiah)
					Persentase GANIS-PH dengan hasil penilaian kinerja layak terhadap total peserta Penilaian Kinerja (Persen) (Dit.IPHH)	BIH- Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Pembinaan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha	617.000.000
B	Dukungan Manajemen								
1	Penguatan pengawasan internal kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Ditjen PHL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (poin) (Sekditjen PHL)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Poin	10.842.642.000
						EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	Layanan	30.000.000
2	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PHL	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (poin) (Sekditjen PHL)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	Poin	150.000.000
						EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	20.000.000

POHON KINERJA BPHL WILAYAH XV TAHUN ANGGARAN 2025

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

Mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari

Optimalisasi pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung serta pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pengendalian pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dalam mendukung fungsi ekologis

Pengendalian Pemanfaatan Hutan untuk dalam mendukung kemandirian desa sekitar areal konsesi

Pengendalian Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Mendukung Perekonomian Nasional

Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam mendukung kebutuhan pasar domestik dan pasar global

Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam Meningkatkan Investasi Sektor Kehutanan

Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Untuk Mendukung PNBP dari Hutan Produksi dan Hutan Lindung

RINCIAN OUTPUT

Nilai SAKIP DITJEN PHL (76 Poin)

Nilai Maturitas SPIP DITJEN PHL (Level 3,8)

Fasilitasi dan pembinaan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari (2 Lembaga)

Penanaman hutan oleh PBPH/ Hak Pengelolaan (2 Badan Usaha)

Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi (1 badan Usaha)

Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (1 Badan Usaha)

Produksi kayu bulat berkelanjutan (2 Badan Usaha)

Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (1 Badan Usaha)

UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL (1 UMKM)

Hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (PBPHH) (11 Badan Usaha)

Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha (2 Badan Usaha)

Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan (3 Badan Usaha)

Tahun 2025 Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh pendanaan yang berasal dari DIPA Tahun 2025 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan sesuai Surat Pengesahan Nomor DIPA-143-06.2.693529/2025 Tanggal 2 Desember 2024, dan setelah melalui tahap Revisi setelah terbitnya peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp. 14.149.442.000,- yang terdiri dari :

- a. Rupiah Murni (RM) : Rp. 11.187.642.000,-.
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) : Rp. 2.961.800.000,-.

Dengan rincian sebagaimana pada Tabel 8.

Tabel 8. Rencana Kerja Kegiatan BPHL Wilayah XV Tahun 2025

KODE	Kegiatan/ Rincian Output	Target		Keterangan
		Fisik	Keuangan	
143.06.FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
7279	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Lembaga	687.499.000	
7279.BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	2 Lembaga	687.499.000	
7280	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 Badan Usaha	167.600.000	
7280.QIH.001	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	2 Badan Usaha	167.600.000	Prioritas Nasional
7281	Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		984.800.000	
7281.BDH.001	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi	1 Badan Usaha	258.740.000	
7281.QDH.003	Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 Badan Usaha	62.600.000	Prioritas Nasional
7281.QIH.001	Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan	2 Badan Usaha	299.160.000	Prioritas Nasional
7281.QIH.002	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Badan Usaha	309.300.000	Prioritas Nasional
7281.QIH.003	Penanaman hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan	2 Badan Usaha	55.000.000	Prioritas Nasional

7282	Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha	617.000.000	
7282.BIH.001	Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	3 Badan Usaha	617.000.000	
7283	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan		649.901.000	
7283.BDG.002	UMKM Kehutanan yang Difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL	1 UMKM	390.602.000	
7283.QDH.001	Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)	11 Badan Usaha	259.299.000	Prioritas Nasional
143.06.WA	Program Dukungan Manajemen			
7317.EBA	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL		11.042.642.000	
7317.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	150.000.000	
7317.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	10.842.642.000	
7317.EBB.951	Layanan Sarana Internal	14 Unit	30.000.000	
7317.EBD.953	Layanan Pemantauan Evaluasi	1 Dokumen	20.000.000	
Jumlah			14.149.442.000	

Sumber : RKA KL BPHL Wilayah XV Tahun 2025 (Revisi 15 Tanggal 3 Desember 2025)

Dalam rangka pencapaian target kinerja kegiatan dan pencapaian rincian output kegiatan, BPHL Wilayah XV Makassar melaksanakan upaya-upaya pencapaian melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Implementasi kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari melalui kegiatan (1) Pendampingan dan Pembinaan KPH dalam Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJP/RPHJpd melalui SI-RPHJP KPH dan Bimbingan Teknis Tata Hutan KPH; (2) Fasilitasi dan Penguatan KPH dalam Mendukung Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari dengan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan KPH Efektif, Bimbingan

Peningkatan SDM KPH/KTH dan Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Produktif pada KTH/KPH. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH).

2. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Implementasi Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha melalui Kegiatan (1) Monitoring dan Evaluasi Bidang Usaha Pemanfaatan Hutan dengan kegiatan pembinaan teknis/fasilitasi pengajuan PBPH/ penyusunan koordinat geografis, Sosialisasi teknis/fasilitasi pengajuan PBPH/penyusunan koordinat geografis. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH).

3. Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Implementasi dilaksanakan dengan Kegiatan (1) Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha untuk Kemitraan Konsesi melalui kegiatan fasilitasi/pembinaan teknis pelaksanaan kerjasama kemitraan oleh PBPH, dan (2) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* pengembangan multiusaha kehutanan pada PBPH, fasilitasi dan pembinaan kegiatan multiusaha kehutanan pada PBPH; (3) Kegiatan Produksi Kayu Bulat Berkelanjutan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi hasil hutan kayu; (4) Kegiatan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu dan kegiatan pengawasam dan pengendalian peningkatan produksi getah pinus; (5) Kegiatan Penanaman Hutan oleh PBPH/Hak Pengelolaan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian penanaman. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH).

4. Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Implementasi dilaksanakan dengan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tertib PNBPN, PUHH serta rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga profesional, tertib pelaksanaan iuran kehutanan dan PUHH melalui kegiatan (1) Peningkatan kapasitas aktor PUHH/PNBPN (GANISPH) dan (2) Kinerja Tenaga Teknis, Monitoring dan Evaluasi Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH).

5. Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Implementasi kegiatan dilaksanakan dengan (1) UMKM kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL melalui Bimbingan Teknis/Fasilitasi Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM oleh BPHL dengan kegiatan Inventarisasi dan verifikasi UMKM Kehutanan; Bimbingan/Pembinaan Teknis SVLK bagi UMKM Kehutanan; Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian; dan Sosialisasi Peraturan SVLK; (2) Kegiatan Hilirisasi Industri Pengolahan Hasil Hutan/Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) melalui kegiatan (a) Fasilitasi peningkatan produksi/kinerja usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah melalui kegiatan fasilitasi usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah dan kegiatan bimbingan teknis peningkatan produksi/kinerja usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah; (b) Kegiatan Pengawasan dan pengendalian Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil dan Menengah melalui Kegiatan pengawasan/pengendalian kinerja usaha industri hasil hutan dan pemantauan harga pasar dan kegiatan temu usaha PBPHH. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH).

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengelolaan Hutan Lestari

Implementasi kegiatan dilaksanakan dengan pemberian layanan berupa (1) Layanan umum seperti pelaksanaan kegiatan rencana program dan anggaran, penyediaan data dan informasi, pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan penilaian SAKIP dan penilaian level maturitas SPIP; (2) Layanan Perkantoran seperti pembayaran gaji dan tunjangan serta pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor; (3) Layanan Sarana Internal berupa pengadaan fasilitas perkantoran; (4) Layanan Pemantauan dan Evaluasi berupa kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup Dijen Pengelolaan Hutan Lestari. Kegiatan ini dibawah dan dipertanggungjawabkan ke Sekditjen Pengelolaan Hutan Lestari.

IV. PENUTUP

Pemutakhiran Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 ini dibuat sebagai dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Lestari. Pemutakhiran Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 disusun berdasarkan kepada Pemutakhiran Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025.

Pemutakhiran Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran dan identifikasi rencana yang dibutuhkan dalam mendukung pencapaian kinerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV dalam Tahun 2025. Pelaksanaan Pemutakhiran Rencana Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV diharapkan dapat memberikan hasil yang mendukung prioritas pembangunan pemerintah, mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan secara baik dan bertanggungjawab sehingga dapat meningkatkan produktifitas hutan dan kesejahteraan masyarakat.